



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI,
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL DAN DIREKTUR UTAMA PERUM
BULOG, SERTA DIREKTUR UTAMA PT RAJAWALI NUSANTARA
INDONESIA (PERSERO) HOLDING PANGAN/ID FOOD**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 17 (tujuh belas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 7 September 2023
Waktu : Pukul 15.05 s.d 17.10 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI);
Acara : Membahas:
1. RKA Kementerian Pertanian Tahun 2024; dan
2. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.
- Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar, S.E., M.B.A/Kabag Set. Komisi IV DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
30 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7 dari 11 orang Anggota
1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
3. Dr. H. Sustrisno., S.E., M.Si.
4. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
5. Maria Lestari, S.Pd.
6. M. R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con

2. Fraksi Partai Golongan Karya
3 dari 9 orang Anggota
 1. Ir. Budhy Setiawan, M.Si. /Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Firman Soebayo, S.E., M.H.
 3. Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
4 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Ir. K.R.T. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 3. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc.
 4. Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
2 dari 6 orang Anggota
 1. H. Sulaeman L. Hamzah
 2. Ir. Abdullah Tuasikal

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Edward Tanur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
 3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional
4 dari 4 orang Anggota
 1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 2. Haerudin, S.Ag., M.H.
 3. Ir. Alimin Abdullah

4. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
0 dari 2 orang Anggota

B. Anggota Izin

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.

C. Pemerintah:

1. Menteri Pertanian (Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.);
2. Wakil Menteri Pertanian (Harvick Hasnul Qolbi);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.);
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dr. Ir. Suwandi, M.Si.);
5. Direktur Jenderal Perkebunan (Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T.);
6. Direktur Jenderal Hortikultura (Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.);
7. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc.);
8. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.);
9. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si.);
10. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr.);
11. Kepala Badan Karantina Pertanian (Ir. Bambang, M.M.);
12. Kepala Badan Pangan Nasional (Arief Prasetyo Adi) beserta jajaran;
13. Direktur Utama Perum BULOG (Budi Waseso) beserta jajaran;
14. Rahmad Pribadi (Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta jajaran; dan
15. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan ID FOOD (Frans Marganda Tambunan) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./F-PDIP):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Menteri Pertanian dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Pertanian, suratnya ada cuman Pak Kasdi ini Sekjen kurang, kurang sensitif, ada surat izinnya tetapi tidak ada surat kuasanya untuk menandatangani serta lain-lainnya. Udah lama jadi Sekjen kok *nggak* paham-paham,
Yang terhormat Kepala Badan Pangan Nasional,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog,
Yang terhormat Direktur Utama Pupuk Indonesia,
Yang terhormat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia,
Hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus 5 Juli 2023 dan keputusan Rapat internal Komisi IV 21 Agustus 2023.

Pada hari ini Kamis, 7 September 2023, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian serta menghadirkan mitra lainnya, dalam rangka membahas:

1. RKA K/L Tahun 2024;
2. Usulan program-program yang didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis. DAK ini dalam rapat kerja sudah disampaikan, dalam RDP sudah disampaikan. Saya rasa tidak perlu nanti kalau tidak penting tolong dijelaskan secara singkat saja.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan tentang Tata Tertib, rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.05 WIB)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Rapat kerja ini kita mulai pada pukul 14.05 menit dan akan diakhiri pada pukul 17.30 menit. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Pertanian atau yang mewakili;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta nota keuangannya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) Komisi melakukan Rapat Kerja dengan pemerintah untuk membahas alokasi untuk anggaran dan kegiatan kementerian/lembaga dan hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran secara tertulis.

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan rapat kerja hari ini adalah berdasarkan Surat Badan Anggaran Nomor B8607/AG.0507/2023 tanggal 12 Juli 2023 mengenai Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2022 dan Rancangan Pembahasan Rencana Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024. Rapat kerja ini merupakan rangkaian terakhir rapat untuk membahas RKA tahun 2024 sebelum disampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.

Pada rapat sebelumnya, Komisi IV juga mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian atas pagu anggaran 2024 sebesar Rp14.658.000.000.000,00 juga mendengarkan penjelasan atas usulan realokasi eksternal lingkup Eselon I Kementerian Pertanian untuk pemenuhan kebutuhan operasional penyuluh dalam penyediaan paket pulsa selama 1 tahun tahun anggaran 2024 senilai 34 miliar.

Komisi IV meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi seluruh anggaran rencana kerja anggaran 2024 sebelum diputuskan dalam rapat kerja hari ini, terutama pada anggaran dukungan manajemen di setiap Eselon I yang dinilai masih terlampau besar. Setiap Eselon I seharusnya memiliki program unggulan yang mendukung produksi dan peningkatan produktivitas.

Selain itu, Komisi IV mengingatkan kembali hasil keputusan rapat sebelumnya agar Eselon I Teknis Kementerian Pertanian untuk bekerjasama dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam rangka penyediaan bibit dan benih berkualitas untuk itu agar hal tercantum dalam RKA tahun 2024. Saudara Wakil Menteri Pertanian beserta jajarannya,

Dalam mendukung percepatan pembangunan perbatasan, Komisi IV menilai perlu ada alokasi anggaran khusus untuk pengembangan pertanian di wilayah perbatasan di masing-masing Eselon I. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya minta Kementerian Pertanian dalam menyusun kegiatan pengembangan wilayah perbatasan sesuai dengan kondisi potensi wilayah masing-masing dengan realokasi anggaran itu dari kegiatan *food estate* dan sumber anggaran lainnya.

Kalau tidak salah kemarin itu anggarannya hanya 2 miliar dari Kementerian Pertanian, kalau perlu tambahkan lagi 8 miliar agar menjadi 10 miliar agar saudara-saudara kita di perbatasan NTT maupun NTB dan Papua mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena di sini ada Pak Ansi Lema yang dari NTT yang selalu setiap saat mengingatkan saya, juga Ibu Maria, juga Pak Sulaeman ya. Kalau perlu setiap provinsi itu 10, 10, 10, jangan kalau 2, 2, 2, itu beda-beda tipis dengan anggaran desa. Jadi antara Kementerian Pertanian itu di langit, Desa itu adanya di bumi, masa' anggarannya cuman 2 miliar untuk satu provinsi, ini kan secara logika tidak ada gunanya. Jadi usulan saya realokasi masing-masing termasuk *food estate* untuk wilayah perbatasan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2021, hal ini sudah kita bahas dalam FGD yang lalu.

Agenda rapat kerja hari ini juga membahas mengenai pagu anggaran dana alokasi khusus bidang Pertanian sebesar 2.762.000.000.000,00 yang terdiri dari DAK fisik sebesar 2.462.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pangan, serta DAK non-fisik sebesar 300.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk peningkatan penyediaan pangan protein nabati, pelatihan pendampingnya, serta pelayanan kesehatan hewan yang mana saat ini hampir semua hewan terutama sapi dan lain-lain kena penyakit, habis PMK ada flu babi atau ASF, habis ASF ada lagi LSD di kita tunggu apa yang akan datang kembali penyakitnya. Berarti ini Dirjen PKH-nya kerjanya kurang serius dalam menangani atau mengecek, juga karantina tidak jelas barang apa yang masuk, itu tidak mungkin ujug-ujug ada di Indonesia tanpa ada pemasukan barang yang tidak benar tersebut.

Catatan kritisi Komisi IV terhadap kegiatan yang dibiayai oleh dana alokasi khusus adalah mengenai pengawasan dalam pelaksanaan terutama dalam kegiatan tematik *food estate* dan pengembangan kawasan sentra produksi pertanian yang dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan Kementerian Pertanian saja. Kementerian Pertanian harusnya mampu memastikan keberhasilan, pengawasan, efektifitas kegiatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang objektif jika kegiatan itu belum berjalan dengan baik.

Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, Komisi IV ingin mengingatkan kembali kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh mengenai pelaksanaan pengembangan *food estate* di seluruh lokasi yang dikelola oleh, saya tegaskan, *food estate* yang dikelola oleh Kementerian

Pertanian serta menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan penyakit mulut dan kuku secara mendetail untuk disampaikan kepada Komisi IV.

Jadi, teman-teman Anggota Komisi IV tadi saya lupa menanyakan apakah disetujui Pak Wamen mewakili Menteri Pertanian?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Silakan kepada Saudara Wakil Menteri Pertanian untuk menjelaskan.

WAKIL MENTERI PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Tentu yang sama-sama kita hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia ID Food, dan tentu saja Hadirin sekalian yang berbahagia,

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita berkesempatan hadir pada acara rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat. Perkenankan kami dari jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan Raker hari ini pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 dengan agenda:

1. Rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2024; dan
2. Usulan program-program yang didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi.

Pada kesempatan rapat kerja hari ini, saya beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang telah menyampaikan berbagai saran dan masukan sebagaimana tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja tanggal 30 Agustus 2023 dan laporan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP)

tanggal 4 September 2023 menjadikan perbaikan bagi kami dalam menyusun kembali RKA Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Sesuai dengan agenda rapat kerja hari ini, izinkan kami melaporkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2024 sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah menetapkan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang dikenal sebagai Prioritas Nasional disingkat PN yang dijabarkan menjadi beberapa Program Prioritas disingkat PP.

Kementerian Pertanian mendukung pelaksanaan PN1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Khususnya pada pelaksanaan PP3 terkait peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP6 terkait peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi tentunya.

Dalam rangka menjabarkan PN dan PP tersebut, Kementerian Pertanian fokus kepada 4 program:

1. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas;
2. Program nilai tambah dan daya saing industri;
3. Program pendidikan dan pelatihan vokasi;
4. Program dukungan manajemen.

Rencana program dan kegiatan tahun 2024 per Eselon I lingkup Kementerian Pertanian selengkapnya disajikan pada lampiran bahan Raker yang sudah disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Dengan berpatokan pada 4 program tersebut, target produksi beberapa komoditas utama Kementerian Pertanian tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Padi sebesar 55,42 juta ton;
2. Jagung 23,34 juta ton;
3. Kedelai 340.000 ton;
4. Cabai 3 juta ton;
5. Bawang merah 1,74 juta ton;
6. Bawang putih 45,91 ribu ton
7. Kopi 818.000 ton;
8. Kakao 694.000 ton;
9. Tebu 39,45 juta ton;
10. Kelapa 2,9 juta ton;
11. Daging sapi/kerbau 405,44 ribu ton; dan
12. Daging ayam 4 juta ton.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023, S-626/MK.02/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal: Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024. Pagu Anggaran Kementerian Pertanian ditetapkan sebesar 14,66 triliun dengan rincian anggaran per program adalah sebagai berikut:

1. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas Rp8,43 triliun;
2. Program nilai tambah dan daya saing industri senilai Rp1,35 triliun;
3. Program pendidikan pelatihan vokasi Rp606,78 miliar; dan
4. Program dukungan manajemen Rp4,27 triliun.

Dalam rangka pencapaian target komoditas produksi yang ditetapkan dari pagu anggaran Rp14,66 triliun tersebut, kami mengusulkan penyesuaian pagu anggaran Kementerian Pertanian per program sebagaimana pada bahan yang telah kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Rencana penyesuaian pagu anggaran per program tersebut sudah memperhatikan dan menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 13 Juni 2023, yaitu dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani diantaranya perlu dilakukan pencegahan hama dan penyakit, peningkatan penyediaan alat dan mesin pertanian dalam kurun pra panen dan pasca panen, hingga sarana dan prasarana pertanian. Selain itu juga, untuk memberikan dukungan anggaran pada pencegahan penyakit hewan seperti *African Swine Fever (ASF)*, *Rabies*, *Lumpy Skin Diseases (LSD)*, dan *Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)*. Termasuk anggaran untuk mendukung operasional petugas serta pengawas di lapangan, serta mendukung kinerja operasional satuan kerja yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Selain itu, menindaklanjuti arahan pada Raker 30 Agustus 2023 dan RDP 4 September 2023. Kami mengusulkan adanya realokasi eksternal sebesar 34,49 miliar lingkup Eselon I Kementerian Pertanian untuk pemenuhan kebutuhan operasional untuk 38.831 penyuluh dalam penyediaan paket pulsa selama untuk 2024 sebesar 46,60 miliar pada BPPSDMP. Mengingat alokasi anggaran yang tersedia untuk penyediaan paket pulsa di BPPSDMP baru selesai Rp112,11 miliar, pada tahun ini 2023 BPPSDMP sudah menyediakan paket pulsa untuk penyuluh selama 6 bulan periode Juli sampai Desember 2023.

Dengan adanya usulan realokasi eksternal tersebut rincian pagu anggaran dari masing-masing Eselon I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal Rp1,49 triliun;
2. Inspektorat Jenderal Rp124,28 miliar;
3. Ditjen Tanaman Pangan Rp2,99 triliun;
4. Ditjen Hortikultura Rp1,01 triliun;
5. Ditjen Perkebunan Rp1,06 triliun;

6. Ditjen PKH Rp2,54 triliun;
7. Ditjen PSP Rp2,58 triliun;
8. Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian Rp958,01 miliar;
9. Badan PPSDMP Rp939,73 miliar; dan
10. Badan Karantina Pertanian Rp966,38 miliar.

Menindaklanjuti.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Pak Wamen. Mohon maaf, ini yang kosong siapa ya, harusnya?

WAMEN PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Pak Menteri.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Oh, Pak Menteri. Pak Menteri nanti datang?

WAMEN PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Sama Pak Itjen.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Oh, Pak Itjen dimana sekarang?

Silakan, kemana Pak Irjenya? Ada izin *nggak*, Pak Sekjen?

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Mohon izin Pak Pimpinan, Ibu.

Saya baru dapat informasi tadi pagi dari Ses-nya, Ses-nya menyampaikan bahwa Pak Irjen memberi kuasa. Belum, belum izin ke kami, Bu sehingga kami tidak mengetahuinya. Nah, saya dapat info juga dari itu dari Ses.

KETUA RAPAT:

Infonya barusan *kok* dikasih tahunya, *kok* info tadi pagi. Anda barusan nanya Irjenya ke mana, *kok* bilang tadi pagi.

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Diperjelas, Bu.

KETUA RAPAT:

Atau perlu kita bintangin aja nanti untuk Irjen ini. Ini udah dua kali *loh nggak* dateng *loh*. Saya ingatkan *loh*. Lagi itu *nggak* datang satu kali, hari ini *nggak* datang juga satu kali. Ini surat kuasa *nggak* ada.

Pak Kasdi jangan bohong *dong*, Anda barusan bertanya *kok*, bilang barunya tahu, baru tahunya tadi pagi gimana. Kalau tahu dari tadi pagi pasti ada surat kuasanya. Tolong bantu saya tolong, kita disiplin rapat. Ini rapat masalah anggaran.

Pak Menteri *nggak* sempat karena ada acara, saya mengerti. Ini pun terjadi kesalahan hanya mewakili bukan surat kuasa, saya pahami. Cuman kalau cara gini kan sesama mitra tidak menghormati *dong*.

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Izin, Bu Ketua, Iya.

Surat kuasanya ada Bu. Bu, disampaikan, Bu, surat kuasa.

KETUA RAPAT:

Sudahlah *nggak* usah basa-basi, surat kuasanya *nggak* ada gitu udah. Kalau ada, udah ada di meja saya dari tadi.

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Siap, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silakan dilanjutkan Pak Wamen.

WAMEN PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Dilanjut, Ketua.
Terima kasih, Bu Anggi.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang terhormat,

Sebagai agenda kedua, kami laporkan bahwa Pagu Anggaran DAK bidang Pertanian tahun 2024 sebesar Rp2,76 triliun yang terdiri dari DAK fisik bidang Pertanian Rp2,46 triliun dan DAK non fisik Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp300 miliar. Kegiatan DAK fisik Kementerian Pertanian terdiri atas dua tematik, yaitu DAK fisik tematik Pengembangan *food estate* dan Pengembangan Kawasan

Sentra Produksi Pangan (KSPP) yang masing-masing menu kegiatannya secara rinci seperti pada bahan yang telah disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI. Sementara untuk kegiatan DAK non fisik terdiri dari tiga menu kegiatan:

1. Pekarangan Pangan Lestari (P2L);
2. Layanan Penyuluhan Pertanian;
3. Biaya Operasional Puskewan.

Mekanisme pengusulan untuk DAK fisik reguler yaitu diusulkan oleh pemerintah daerah melalui Krisna DAK, sedangkan DAK fisik afirmasi DPR yaitu diusulkan melalui Pimpinan Banggar DPR RI ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu untuk diproses lebih lanjut. Batas akhir pengusulan DAK fisik afirmasi DPR RI tahun anggaran 2024 telah ditetapkan tanggal 21 Agustus 2023, sementara DAK non fisik pengusulannya sepenuhnya oleh Pemda.

Rekap usulan anggaran DAK fisik bidang pertanian tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,56 triliun yaitu:

1. Usulan pemerintah daerah 2,48 triliun; dan
2. Usulan Banggar DPR RI Rp80,4 miliar dan dalam proses finalisasi penilaian.

Sementara usulan DAK non fisik Rp309,94 miliar saat ini fase penilaian sinkronisasi DAK sudah berakhir tanggal 28 Agustus 2023 dan selanjutnya menunggu perhitungan alokasi DAK yang akan dibahas pada forum *trilateral meeting* pada awal September 2023.

Selain itu, mohon izin untuk melaporkan bahwa dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara di Arut, Motaain, dan Skouw, maka Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2024 mengalokasikan anggaran kegiatan di 3 lokasi perbatasan negara tersebut.

Anggaran kegiatan di 3 lokasi perbatasan negara tersebut sebesar Rp26,99 miliar, yaitu masing-masing di Aruk Rp11,99 miliar, Motaain Rp8,14 miliar, dan Skouw Rp6,85 miliar.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan.

Selanjutnya mohon izin kepada Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI agar masing-masing Eselon I dapat diberikan kesempatan menyampaikan paparan sesuai dengan agenda RDP hari ini. Atas perkenan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI kami ucapkan terima kasih.

Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya.

Silakan kalau Bu Ketua, perwakilan fraksi yang mau menyampaikan jawaban atau tanggapan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik.

Silakan para juru bicara fraksi, dimulai dari Bapak Doktor Azikin Solthan. Silakan.

F-P.GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam Indonesia Raya,

Terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV dan seluruh jajaran Kementerian Pertanian dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Pertanian, Yang kami hormati Direktur Bulog, PT Rajawali ID Food, beserta masing-masing rombongan,

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2003 tentang Badan Karantina Indonesia di dalam aturannya telah dijelaskan bahwa Badan Karantina Indonesia nantinya akan meleburkan tiga direktorat yang ada di tiga kementerian, yaitu Badan Karantina Hewan dan Tumbuhan yang ada di Kementerian Pertanian, Badan Karantina Ikan di Kementerian Kelautan, serta Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mohon pendalaman Bapak Menteri tentang anggaran Badan Karantina Pertanian yang mencapai 966.383.630.000. Bagaimana strategi dan rencana transisi ke depan karena akan banyak perubahan mengingat Badan Karantina Indonesia akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

2. Tahun anggaran 2024 menjadi tahun terakhir Kementerian Pertanian periode ini dan di tahun terakhir ini kami minta Kementerian Pertanian untuk fokus dalam program regenerasi petani, juga menumbuhkan petani wirausaha baru. Kami minta dapat melibatkan berbagai perguruan tinggi di luar Polbangtan dan juga yang utama berbagai, mengajak berbagai perguruan tinggi di luar Polbangtan dan juga yang utama mengajak seluruh organisasi tani, pemuda tani, mahasiswa pertanian untuk terlibat aktif. Program regenerasi petani bukan hanya tugas BPPSDMP, tapi tugas semua Eselon I sehingga kami minta kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa tergabung dalam organisasi di luar kelompok tani juga bisa mendapatkan bantuan sarana produksi pertanian.

Demikian catatan, tanggapan, usulan, dan pertanyaan ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam Indonesia Raya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumussalam.

Gerindra.

Pak Ansi Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Terima kasih, Pimpinan.

Selamat sore,
Salam Pancasila,

Mewakili PDI Perjuangan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan.

Yang pertama. Pada prinsipnya kami mendukung pagu anggaran 14,66 triliun tetapi dengan catatan Kementerian Pertanian perlu betul-betul memperhatikan catatan rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat beberapa hari lalu dan harus ada perbaikan dalam penyusunan RKA 2024 yang orientasinya melahirkan program-program yang sungguh berkualitas dan berdampak konkrit bagi peningkatan kesejahteraan petani dan peternak.

Yang kedua, kami juga menegaskan tentang fokus pada program nasional dan mengedepankan prioritas pada program-program unggulan sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama, antara lain menyangkut program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing

industri, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program dukungan manajemen, dan yang terakhir adalah antisipasi terhadap pencegahan penyakit hewan seperti *african swine fever*, rabies, dan sebagainya.

Yang berikut secara khusus kami memberikan apresiasi, terutama terkait dengan afirmatif *policy* berupa dinaikkannya anggaran untuk membantu petani dan peternak di wilayah perbatasan.

Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, dan para Dirjen,

Kami sudah membaca paparan Kementerian Pertanian terutama terkait dengan anggaran untuk membantu petani dan peternak di perbatasan dari semula angkanya itu adalah 16,1 miliar menjadi kemudian 26,99 miliar dengan komposisi antara lain untuk Papua 6,8 miliar, untuk Kalimantan Barat 11,99 miliar, dan untuk Nusa Tenggara Timur 8,14 miliar naik dari 2,2 miliar. Tetapi kalau boleh kami tegaskan seperti kata Pak Ketua, saya hanya sekedar mengalas apa yang disampaikan oleh kata Pak Ketua, kalau bisa tiga daerah ini 10, 10, 10 atau yang Ibu Maria ya udah lebih tinggi juga tidak apa-apa, ya kan begitu. Karena memang sudah 11,9 kan, jangan diturunkan. Tetapi yang Pak Sulaeman dan Pak Ansi ini NTT ini ya dinaikkan jadi 10, Pak, kira-kira begitu, Pak Sekjen.

Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan.

Terima kasih. Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian. Saya kembalikan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik.

Terima kasih, Pak Ansi Lema.

Ibu Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat sore,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Ketua saya,

Yang saya hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi IV dan juga Bapak Wamen, Pak Sekjen beserta jajaran Eselon I,

Pak Buwas, Pak Arief, Pak Frans, dan di sini juga ada PIHC ya,

Insyah Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya karena kita sudah masuk dalam tahun anggaran yang insyaa Allah 2024 ini kalau bisa El Nino jangan lagi ada, karena ini dampaknya luar biasa kepada pangan kita apalagi kemarin tanggal 16 Agustus Pak Presiden selalu mengingatkan setidaknya kita kalau bisa mandiri pangan.

Pak Wamen, tentunya saya selalu menyampaikan kepada Kementerian Pertanian karena di sini juga ada Bapanas sekalian aja nih, Pak Arief. Saya selalu mengharapkan setiap provinsi yang menghasilkan komoditi-komoditi andalan misalkan di Pulau Jawa apa, Pulau Sumatera apa, Kalimantan apa, Sulawesi apa, Papua, Maluku apa, itu diberikan prioritas penganggaran sesuai dengan hasil produksi pertanian mereka, sehingga kegiatan di Kementerian Pertanian cukup dan tepat sasaran. Yang menjadi pertanyaan saya di tahun 2023, angka konsumsi beras semakin meningkat dan juga pastinya kebutuhan konsumsi beras pasti harus juga terpenuhi.

Pak Buwas, saya kemarin pernah menyarankan apakah bisa Kementerian Pertanian, juga Bapanas, dan juga di sini pasti ada Bulog, rapat bersama dengan pemerintah daerah dan provinsi mungkin melalui Kementerian Dalam Negeri agar bisa menyampaikan bahwa kita dalam keadaan seperti ini. Misalkan, kalau memang beras semakin mahal kenapa konsumsi beras ini semakin tinggi? ini kan kita pertanyaannya berarti di mana ada kebutuhan mau mahal dan tidak mahal pasti dibeli, dikonsumsi. *Nah*, ini yang menjadi pertanyaan saya.

Dan juga El Nino ini dampaknya pasti diproduksi, pasti dengan sangat kita yakin pasti menurun, dan penyerapan dari Bulog pun kemarin kita sudah RDP, terus kita Raker di dalam negeri sampai 600.000 ya, Pak, ya kalau untuk 500, 800.000, 800.000 ya *alhamdulillah*, tapi kalau seandainya hasil produksi kita lebih dari itu dan kita tidak butuh *import* kan lebih baik. Jadi, saya berharap di pangan nasional kita yang kita tujukan, ajukan bersama ini memang satu data tentunya dari Badan Statistik, terus juga dari pertanian pastinya di, di daerah dan provinsi. Terus juga Bapanas, saya berharap selalu kalau bisa dengan adanya Bapanas juga mengetahui proses-proses dan progres-progres dan hasil-hasil industri yang ada di provinsi-provinsi penghasil industri tersebut, tentunya pupuk menjadi permintaan yang paling utama setiap turun ke lapangan, terus ketersediaan air, alat-alat pertanian itu pasti. Tapi juga kita tidak menutup kemungkinan bahwa virus-virus yang ada selain dari kemarin PMK, sekarang juga ada LSD, terus juga ada juga penyakit anjing gila atau rabies, ini juga menjadi perhatian dari semua wilayah.

Terima kasih, Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Terima kasih, Bu Alein.

Pak Sulaeman Hamzah, silakan Pak Sulaeman.

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Wakil Menteri Pertanian, seluruh Eselon I, dan seluruh jajaran yang saya hormati,
Para mitra kerja Badan Pangan, Bulog, dan seluruhnya yang saya tidak sebutkan satu per satu,

Pertama, dari Fraksi Partai Nasdem, kami mendukung pagu anggaran 14,66 triliun dan sekaligus untuk kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian untuk tahun 2022 dan juga 2023, kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang luar biasa dengan pemenuhan komoditas strategis dan sesuai dengan data yang ada, kita patut memberi apresiasi tentang ketersediaan pangan secara nasional.

Yang kedua, mengenai anggaran perbatasan, tadi Pak Ketua sudah sampaikan, Pak Ansi juga sudah menimpali. Saya juga meminta kalau bisa itu anggaran untuk perbatasan dinaikkan menjadi 10 miliar, karena memang wilayah Papua sendiri ada 7 kecamatan yang berbatasan langsung dengan PNG, 7 kecamatan termasuk Skouw yang sudah disampaikan dalam rencana anggaran tahun ini, tahun 2024 maksudnya. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga, saya mau sampaikan juga tentang Inpres 9 tahun 2020. Inpres 9 ini diketuai oleh Wapres sendiri dan sumber keuangannya itu dari seluruh kementerian dan lembaga, dan ini peruntukannya adalah untuk percepatan pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Saya meminta kalau belum dianggarkan di sini, sebisa mungkin dimasukkan entah dalam bentuk program atau apa sehingga terlihat bahwa Inpres ini ada gunanya. Kalau tidak, hampir tidak diperhatikan sama sekali, padahal ini Inpres dua kali terbit. Dua kali terbit, pertama tahun 2017 tapi sampai dengan akhir masa jabatan kemarin tidak selesai. Lalu, tahun 2020 dengan Inpres yang sama nomor 9, itu juga diterbitkan lagi dan sampai sekarang memang belum ada realisasinya. Ini saya mohon sebisa mungkin dari Kementerian Pertanian bisa menganggarkan untuk itu.

Yang berikut, terkait dengan relokasi anggaran untuk kepentingan apa namanya penyuluh yang tadi sudah disampaikan untuk mendukung kegiatan penyuluh di lapangan. Saya kira ini patut kita dukung bersama, karena memang apa yang kita lihat di lapangan para penyuluh ini selain jumlahnya kurang sehingga

tidak bisa menempati seluruh pos yang mestinya mereka ada di sana. Dengan terbatasnya tenaga, kemudian kalau tidak didukung dengan anggaran yang cukup memang ini sangat kesulitan di lapangan. Karena itu, untuk hal ini saya sampaikan mendukung untuk ini harus bisa dilaksanakan.

Selanjutnya, saya juga mau sampaikan tentang apa anggaran pengembangan kawasan perbatasan ini, yang di sini perencanaannya sudah dimasukkan untuk di daerah Skouw atau Kota Jayapura. Saya kira ini lebih pas untuk kita posisikan di selatan, karena di selatan ada dua distrik yang memang berbatasan langsung dengan PNG, sementara di Skouw ini sudah banyak sekali program yang turun di sana. *Nah*, kalau bisa kita posisikan di Merauke sehingga ini bisa mendukung kegiatan di Papua Selatan.

Saya kira begitu.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik.

Terima kasih, Pak Sulaeman.

Selanjutnya, Pak Edward.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik.

Selamat sore untuk kita semua,

Pimpinan Komisi IV beserta Anggota Komisi IV yang saya hormati, Wamen Kementerian Pertanian beserta Sekjen Kementerian Pertanian dan Eselon I yang saya hormati, beserta BUMN Direktur Bulog, Badan Pangan Nasional, ID Food, dan lain-lainnya ini sebut satu-satu bingung juga ini,

Terima kasih banyak sudah hadir, ini pertanda baik ini. Yang penting daerah perbatasan sudah kasih naik tambah dana, cuma kita minta kalau bisa 10 miliar, masih kurang sedikit, itu tanda yang baik. Memang...

KETUA RAPAT:

Pak Edward. Pak Edward mintanya berapa?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Tadi Pak Ketua bilang, paling kurang 10 *toh*.

KETUA RAPAT:

Ya sudah, 10. Nanti dalam kesimpulan dimasukkan, aman kan.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Oh, iya. Saya tambah sedikit supaya lebih jelas lagi.

KETUA RAPAT:

Oh.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Karena kami orang NTT biasanya omong mesti tegas, ulang-ulang tidak apa-apa.

KETUA RAPAT:

Bukan karena *live* supaya dilihat orang-orang kampung gitu bukan?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Oh, tidak. *No problem* itu, yang penting NTT tetap sejahtera. Itu kunci, kata kuncinya. Jadi, baik terima kasih, Pak Ketua. Kalau saya mengulang Pak Ketua jangan kurang hati, karena kami ini biasanya dengan niat tulus kami mengapresiasi Kementerian Pertanian.

Jadi, baik. Ini tadi lagi heboh dalam kata sambutan juga ada El Nino. Memang El Nino ini seksi, yang diperkirakan bahwa kita akan gagal panen dan sekarang sementara memasuki tahap gagal panen ini di beberapa daerah, untuk itu untuk mengatasi El Nino ini salah satu solusinya yaitu mungkin perbaikan embung-embung, saluran-saluran irigasi, dan sumber-sumber air terlebih yang sungai-sungai yang masih mengalir itu dimaksimalkan potensi air yang masih sisa.

Dan juga berikutnya mengenai pengamanan daripada pangan ini. Pangan ini, saya kira diversifikasi pangan berkeaneka-ragaman pangan Indonesia ini terkenal sekali, banyak pangan beraneka-ragam. Jadi mungkin dari kementerian lewat Dirjen-Dirjennya bisa memanfaatkan kekayaan alam yang luar biasa, karena biar lain belum tentu sama seperti kita.

Jadi, ini perlu disampaikan walaupun kita semua tahu, tapi saya bertegas saja. Jadi jangan ada yang tersinggung, karena ini forum ini kita harus saling mengingatkan, tidak salah. Kita saling mengingatkan itu biasa barang biasa, jangan tersinggung, kalau rapat-rapat ini kita harus omong terbuka dan *slow*, jadi begitu *toh*, Pak.

Jadi, kami berterima kasih karena Kementerian Pertanian ini telah banyak memberikan kontribusi kepada para Anggota DPR RI dan juga kepada masyarakat. Sangat baik, program-programnya sangat berpihak kepada rakyat, sangat, bukan berpihak *sih* sangat berpihak, kalau tidak kita mati kelaparan sudah. Jadi itu salah satu apresiasi yang saya berikan.

Dan juga dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan seperti apa yang telah termuat dalam Undang-Undang Pangan ini perlu kita wujudkan, jadi jangan hanya slogan saja. Anggaran lumayan, walaupun dia turun dari tahun lalu, dari 2022 lebih tinggi *eh* 2023 lebih besar daripada 2024. Tapi saya kira kita jalani aja dulu, siapa tahu di pertengahan tahun anggaran bisa ada perubahan. Jadi tetap semangat ya Bapak-Bapak dari Pertanian, jangan putus asa, karena masih ada hari esok. Tenang saja.

Harga beras, saat harga beras yang naik terus ini, iniantisipasi tadi kita sudah dengan Badan Pangan Nasional, kita sudah bicarakan bahwa gagal panen ya ada daerah yang gagal panen, tapi kan sudah diberi kewenangan untuk impor khususnya yang setara dengan beras yang stoknya masih ada. Jangan khawatir, nanti kalau dia mau habis, *import* lagi. Sampaikan saja Bapak Presiden bahwa kestabilan pangan ini perlu sekali, jangan sampai kita tidak beli baju tidak apa-apa, tapi kalau tidak makan *wah* itu artinya busung lapar menjemput kita.

Jadi saya setuju mendukung program-program ini, apa yang sudah kami sampaikan apresiasi yang besar dari pemerintah atau dari di tempat ini Kementerian Pertanian beserta jajarannya dan Direktur Bulog, ID Food dan Bapanas, kami sekali lagi saya memberikan apresiasi yang tulus. Artinya bukan karena bilang mau cari muka, tidak, tulus. Kita ini orang-orang realistis bukan orang-orang hanya asal ngomong, kita ngomong kita lihat di lapangan dan kita tuangkan dalam rapat ini. *Nah* itu sudah bukan. Jadi itulah watak saya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya ucapkan sesuai dengan di lapangan, tidak mungkin meleset. Itulah orang-orang yang setia kepada rakyat.

Terima kasih banyak Pimpinan Komisi IV. Terima kasih banyak hanya ini yang dapat disampaikan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Terima kasih, Pak Edward.

KETUA RAPAT:

Cuma ngomong gitu doang?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silakan, Pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan,
Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, para pejabatnya Eselon I, Dirut Bulog, Kepala Badan dan ID Food, serta
Hadirin sekalian yang saya hormati,

Saya ingin ingatkan bahwa fungsi Dewan jelas di dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar '45, memiliki fungsi dan sekaligus hak legislasi, *budget*, dan pengawasan. Olehnya itu, anggaran yang diajukan oleh kementerian bukanlah sesuatu yang seperti kitab suci yang tidak bisa berubah, bisa berubah di sini setelah kita lakukan pembahasan. Olehnya itu, kita sudah memberikan tanggapan, kritik, pandangan, saran, baik di Raker pertama, RDP, sampai Raker kedua pada hari ini.

Saya ingin menyampaikan beberapa catatan sebelum saya memberikan persetujuan.

1. Dalam APBN 2024 ini, saya berharap memastikan petani boleh menanam di lahannya, baik itu pangan, horti, dan perkebunan. Memastikan bantuan benih bagi petani miskin yang tidak mampu membeli benih dapat dibantu oleh pemerintah;
2. Memastikan pupuk tersedia baik itu pupuk kimia maupun pupuk organik, baik pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi;
3. Peningkatan SDM petani dan mendorong petani muda untuk masuk di lapangan usaha pertanian yang dapat menjanjikan kesejahteraan bukan sama dengan petani sama dengan miskin;
4. Alokasi anggaran dukungan manajemen untuk dievaluasi sebesar 4,2 triliun tetap saya anggap sebagai pemborosan dan tidak efektif dan maupun efisien. Kesimpulan rapat kita ada Lapsing nomor 7 pada saat Raker maupun RDP meminta agar ini di efisienkan untuk dialokasikan kepada hal-hal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh petani;
5. Alokasi indikatif 4,66 triliun dari 108 triliun APBN yang di sektor ketahanan pangan menjadi evaluasi bagi Kementerian Pertanian bahwa saat ini mungkin Kementan tidak mendapat *trust* sepenuhnya dari Presiden ataupun Menteri Keuangan di tengah kenaikan APBN yang signifikan. Tapi

alokasi untuk Kementan turun terus, ini harus dievaluasi di mana masalahnya.

Itulah beberapa catatan yang disampaikan. Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, fraksi kami dapat menyetujui pagu indikatif sementara, Pak Ketua ya, 14,66 triliun dengan catatan tersebut di atas.

Demikian.

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih, Pak Suhardi Duka.

Pak Slamet, silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih Pak Ketua, Bu Ketua, Ibu dan Bapak Wakil Ketua yang saya hormati, Anggota Dewan yang saya hormati, Wakil Menteri beserta jajaran yang saya hormati,

Karena sudah melalui berbagai pembahasan yang cukup panjang sehingga secara prinsip pagu indikatif sementara yang disampaikan oleh Kementan ya secara prinsip PKS juga menyetujui, hanya ada beberapa catatan: yang pertama, lagi-lagi saya tidak bosan-bosannya untuk ngomong masalah *food estate* ya. Jadi, masih pro kontra terkait *food estate*, maka di 2024 yang memang DAK-nya ada, anggarannya ada, apa Kementerian Pertanian harus serius mencatatkan sejarah paling tidak, 2024 yang sudah dianggarkan, *food estate* betul-betul di lapangan berhasil sesuai dengan harapan sehingga bisa menjawab tantangan terkait dengan isu kelangkaan pangan global, sehingga ini menjadi catatan saya terkait dengan pelaksanaan itu.

Kemudian juga nanti terkait dengan PSIP, program yang tambahan itu. Setelah nanti disetujui Banggar, kemudian perlu penjelasan secara rinci program apa yang kemudian akan dilakukan dengan tambahan sekitar 8 miliar itu.

Terakhir, tentunya Badan Pangan *eh* Badan Karantina, Pak. Kita tidak mau kejadian tahun sebelumnya di mana Badan Pangan kemudian harus berkamoufla apa bermetamorfosa, termasuk juga dan PSIP itu dengan adanya nanti ditetapkan Badan Karantina ini anggarannya seperti apa. Jangan sampai kemudian anggarannya termasuk asetnya ini tarik menarik ya karena ini sudah ada pagunya di sini, sementara itu akan segera direalisasikan sehingga ini nanti langkah-langkah mitigasi dari Kementerian Pertanian harus segera dilakukan karena ini tuntutan undang-undang mau tidak mau ke Pimpinan Kepala Badannya harus segera ada sehingga kalau sudah ada tentunya apakah nanti apa anggarannya di mana, kemudian asetnya juga harus perlu dipikirkan.

Itu catatan saya, Bu Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik.

Yang terakhir Pak Syafrudin.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ibu Ketua, Pak Wamen, dan Bapak-Bapak Dirjen yang saya hormati, saya cintai,

Saya ingin menyampaikan beberapa catatan walaupun dari anggaran Bapak-Bapak ini terjadi penurunan, tetapi saya ingin menekankan adanya, pertama adalah koordinasi, Pak Wamen. Koordinasi antara Bapak-Bapak yang berada di Jakarta dengan provinsi sampai dengan di bawah, hal-hal teknis mungkin saya tidak perlu sampaikan. Misalnya distribusi yang lain-lain itu yang sampai hari ini saya tidak melihat sesuatu peningkatan kinerja yang sangat bagus, karena misalnya pendistribian barang distribusi barang yang terkadang datangnya tengah malam atau kadang-kadang kami tidak ada di tempat ini menjadi catatan yang tidak bagus. Ya walaupun turun anggarannya, tapi mohon ini diperbaiki.

DAK non fisik saya melihat tidak tahu *nih* apakah di daerah pemilihan saya ada, tapi tergantung dari pemerintah daerahnya. Tapi ini mohon kiranya menjadi perhatian buat kita semua.

Kemudian saya melihat untuk nomor 9, yaitu Badan PPSDM Pertanian ada Rp939.734.267.000,00. Saya menyampaikan kepada Pak Wamen agar ini menjadi perhatian buat kita semua, walaupun sekali lagi walaupun anggaran ini turun tetapi tolong dialokasikan walaupun tidak terlalu tinggi untuk teman-teman penyuluh. Kita tahu BOP-nya Rp50.000,00 ini orang yang Bapak-Bapak tambah, tapi ini walaupun sekali lagi walaupun turun karena ini penting sekali teman-teman penyuluh di lini terdepan tuh selalu mungkin tidak hanya di daerah pemilihan saya tapi seluruh Indonesia membutuhkan perhatian kita semua yang berada di Jakarta.

Terakhir, masalah pupuk. Masalah pupuk sekali lagi walaupun dengan anggaran yang agak turun mohon perhatiannya kepada Bapak-Bapak sekalian di kementerian agar koordinasi masalah pupuk ini jangan sampai terjadi beberapa kesalahan di lapangan. Ada pengurangan yang sangat banyak sekali sehingga terkadang petani mendapatkan kerugian dan tidak mampu memberikan harga yang tidak berimbang di lapangan.

Saya kira itu. Maka dengan ucapan *bismillahirrahmanirrahim*, saya mewakili Partai Amanat Nasional dengan angka 14,66 triliun, kami setuju dengan catatan yang saya sampaikan di atas tadi.

Terima kasih.

*Billahi fii sabilil haq fastabiqul khairat,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumsalam,

Baik.

Terima kasih.

Bapak-Ibu sekalian,
Sudah kita terima semua catatan dan respon dari para Anggota.
Silakan Pak Wamen untuk ditanggapi dan dijawab.

WAMEN PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Baik.

Terima kasih.

Pak Sekjen mohon ditanggapi, Pak Sekjen.

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Baik.

Terima kasih Pak Wamen.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan,

Yang pertama, catatan-catatan yang terkait dengan fokus daripada kegiatan dan anggaran akan kami tindaklanjuti karena memang itu adalah bagian yang sangat penting untuk menyempurnakan perencanaan kita.

Yang kedua, kawasan perbatasan. Tadi banyak sekali juga mulai dari Pak Ansi, Pak Edward dan yang lain untuk bisa kita tambahkan nanti Pak Ansi. Terima kasih, Pak Ansi.

Kemudian Pak tadi Pak Sulaeman. Pak Sulaeman, terima kasih, Pak, nanti segera kami akan dirubah dua digit, masing-masing 10, kecuali yang sudah ini yang Kalbar yang sudah 11 tadi. Baik, terima kasih.

Kemudian hal yang juga sangat penting, Pak Slamet terima kasih atas evaluasinya berkait dengan *food estate*. Kami segera melakukan juga evaluasi lebih detail lagi di setiap Ditjen yang menangani, Pak Slamet, baik itu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, NTT.

Kemudian yang lain kaitannya dengan apa fokus daripada kegiatan sesuai dengan potensi pengembangan di masing-masing wilayah, itu juga kita sudah banyak membahas di Raker pertama maupun juga di RDP, kami tentu akan tindaklanjuti hal itu karena memang tadi Bu Alien juga sampaikan hal itu.

Pak Suhardi, terima kasih, Pak. Tentu satu persatu kami evaluasi, utamanya yang berkait dengan dukungan manajemen untuk bisa kami cermati lagi, kami telisik untuk bisa menjadi realokasi ke substansi daripada seperti misalnya peningkatan produksi.

Kemudian yang lain Pak Slamet berkaitan dengan Badan Karantina Indonesia nanti juga kita tidak lanjutin di FGD juga, kami sudah komunikasikan untuk anggaran dan aset itu Pak, SDM juga termasuk itu. Dan tentu akan menjadi catatan kami untuk bisa kita siapkan.

Ini secara umum tadi beberapa hal yang ingin kami tanggapi dari berbagai pertanyaan masukan Pak Azikin, Pak Ansi Lema, Bu Alien, Pak Sulaeman, kemudian Pak Edward, Pak Suhardi Duka, Pak Slamet, dan Pak Syarifudin.

Saya kira demikian, Pak Pimpinan.

Terima kasih.

Kami kembalikan Pak Wamen.

WAMEN PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Baik.

Terima kasih Ketua, Anggota yang hadir.

Kami berharap agar ajuan anggaran kami dapat disetujui. Kami kembalikan, Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya bertanya sama Dirjen PKH. Pengadaan vaksin jumlahnya berapa semua? pakai *mic*.

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Totalnya 50.179.000.

KETUA RAPAT:

Yang sudah terdistribusi berapa?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Terdistribusi 73,56%.

KETUA RAPAT:

Berapa?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

73,56%.

KETUA RAPAT:

Saya tanya jumlah dosis?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Dosis.

KETUA RAPAT:

Nggak punya catatan?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Kami datanya presentase Pak, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya kan, tinggal di ekuivalen. Tadi bilanginya *lima puluh juta seratus tujuh puluh sembilan*, ekuivalen 70 berapa persen tadi?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Jumlahnya dua, distribusi.

KETUA RAPAT:

Anda dengar, saya *ngomong*.

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Dua puluh lima juta.

KETUA RAPAT:

Anda dengar, saya *ngomong*. Anda tulis. Vaksin yang sudah terdistribusi jumlahnya 25.211.500.

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Iya Pak, betul.

KETUA RAPAT:

Ya. Stok vaksin pusat 24.000.968.

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Iya.

KETUA RAPAT:

Betul? Ya. Yang sudah disuntik berapa persen?

DIRJEN PKH KEMANTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Delapan belas juta seratus sembilan puluh tujuh.

KETUA RAPAT:

Berarti berapa persen?

DIRJEN PKH KEMANTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Dari total.

KETUA RAPAT:

Yang sudah divaksin kurang lebih 37,5% dari semua pengadaan vaksin PMK. Sekarang pertanyaannya, yang sudah didistribusikan ya ke provinsi.

DIRJEN PKH KEMANTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Iya, Pak.

KETUA RAPAT:

Itu bagaimana statusnya? penyimpanannya bagaimana? pengawasannya bagaimana? sementara mungkin provinsinya mau menyuntikkan tidak ada alat suntik, mungkin alat suntiknya ada tenaga penyuntiknya *nggak* ada mau disuntiknya, ini kan *nggak* di, di, *nggak* di diantisipasi oleh kalian semua ini coba bayangkan. Kemarin terakhir berapa laporannya, berapa lama lagi *expired*, yang 20 atau 25 juta kurang sedikit ini.

DIRJEN PKH KEMANTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Ada yang Juni, ada yang September 2024, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Kemarin bilanganya September 2023 *plus* Juni 2024, mana yang benar? rekamannya ada loh.

DIRJEN PKH KEMANTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Kita akan habiskan, ada Pak datanya di sini. Lengkap, per *expired*-nya, Pak, ada.

KETUA RAPAT:

Ingat loh masih 20, April 25 juta kurang sedikit loh di pusat loh.

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Yang kadaluarsa tahun yang paling cepat adalah 11 Januari 2024 sebesar 2,3 juta. 28 Januari 2024, 4 juta.

KETUA RAPAT:

Ulangi lagi. Nanti kalau saya tanya, jangan sampai beda karena Anda tak jawab pertama beda, ini beda yang kemarin beda lagi. Ulangi.

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Yang 11 Januari 2024, 2,3. 28 Januari '24, 4 juta. 1 September 2024, 492 hampir 493 lah hampir 493. Juni 2024, 3,1 juta. 1 September 2024, 5,089 juta. 7 Mei, *satu juta seratus*. 6 Juni 24, *satu juta setengah*. Juni 2024 juga *tiga juta setengah*. Maret 2024 3,72, e-faktor laporan lengkap sesuai dengan hasil RDP akan kami sampaikan Pak, lengkap.

KETUA RAPAT:

Harusnya gini *loh*. Januari, kemudian Maret, baru Agustus, ini kan. Lihat, berarti kan catatan anda itu *nggak* jelas. Habis bicara Januari baru ke September, September balik lagi ke Maret.

Yang untuk LSD, berapa total pengadaannya udah, udah didistribusikan?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

LSD, Pak Ketua, pengadaan vaksin kita dari APBN 100.000. Kemudian bantuan dari WHO/Organisasi Kesehatan Dunia 1 juta dosis.

KETUA RAPAT:

Yang 100.000 ini anggaran tahun berapa?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

2023, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

100.000?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah pengadaannya?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Sudah, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, kapan mulai pengadaannya?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Maksudnya pelaksanaannya, Pak?

KETUA RAPAT:

Iya. Sudah pengadaannya kapan?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Saya *nggak* tahu siapa perusahaannya, Pak.

KETUA RAPAT:

Yang saya tanya, sudah pengadaannya kapan mulainya. Bukan siapa yang mengadakan, saya *nggak* tanya siapa.

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Untuk vaksin LSD APBN, untuk yang proses pengadaan saat ini ada 75.000 dari 100.000.

KETUA RAPAT:

Baru proses pengadaan kan, belum ada pengadaan kan?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Belum.

KETUA RAPAT:

Tadi ada bilang 100.000 kan, karena Anda kan. *Gini Iho*, ini kebiasaan Eselon I *nih*, terima bahan tidak dibaca dulu di rumah, tidak di jalan. Kalau saya, saya baca secara detail di jalan.

Hibah dari Australia berapa banyak?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

1 juta, Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi, hibahnya lebih banyak daripada pengadaannya. Yang saya tanyakan, nanti biaya penyuntikan siapa yang tanggung *nih*, kalau pemerintah provinsi kabupaten kota tidak ada dana?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Jadi yang ada baru yang 100.000, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Hah?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Baru yang 100.000 yang ada operasionalnya.

KETUA RAPAT:

Oh. Yang satu juta jadi dikasih *nggak* ada operasionalnya?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Belum ada.

KETUA RAPAT:

Oh. Ya, saya berharap yang dikasih cepat *expired* aja seperti vaksin PMK tadi.

BPSDMP saya mau tanya, program YESS itu apa? Jelaskan.

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Program YESS, salah satu program dari BHLN Pak Ketua, singkatan dari *Youth Entrepreneurship Support Service*. Jadi di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan untuk mendorong ya petani muda ber-agribisnis.

KETUA RAPAT:

Terus?

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Nah, kemudian yang kita lakukan tentu saja kegiatan-kegiatannya adalah berupa pelatihan-pelatihan agribisnis, yang termasuk juga pelatihan budidaya, kemudian juga ada pendampingan, Pak Ketua, kemudian juga ada kita mendorong agar para petani milenial mendapatkan kredit usaha rakyat.

KETUA RAPAT:

Udah ada yang dapat belum?

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Kenapa, Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Sudah ada yang dapat belum?

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Sudah, Pak.

KETUA RAPAT:

Berapa banyak? Inget *loh*, saya tanya ini, dua bulan lagi saya tanya di otak saya masih saya ingat.

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Saya ingatkan ya. Saya tanya, sudah ada belum? berapa banyak? wilayah mana saja?

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Iya. Sebetulnya program ini bukan hanya di YESS saja, tetapi ada juga yang program APBN, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Yang saya tanyakan tadi kan program YESS dulu Pak, Pak Doktor. Yang saya tanyakan ini masalah program YESS, nanti yang lain saya tanya lagi. Dijawab dulu yang YESS.

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Iya.

Kalau total petani milenial yang mendapatkan kredit usaha rakyat itu ada 140.000 orang, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

140.000 orang, berapa provinsi?

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Itu semua provinsi, 38 provinsi, Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi semuanya dapat *nih*? Coba dicek ulang dulu datanya.

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Distribusinya.

KETUA RAPAT:

Nggak, di cek dulu datanya betul *nggak*. Saya kasih kesempatan untuk koreksi.

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Ada datanya? Yang dapat KUR per provinsi, per provinsi ada? Semua 38 provinsi? Oke.

Jadi kalau untuk program YESS, Pak Ketua, 4 provinsi ya sedangkan tadi yang mendapatkan KUR itu semua provinsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tadi anda katakan yang YESS sekian puluh provinsi, sekarang beda lagi. Mana yang benar ini kalau *ngomong*? Coba sebutkan, kabupaten mana aja.

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Itu dari Provinsi Jawa Barat, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Banten, dan Jawa Timur Pak, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Cek dulu, ada *nggak* Banten. Anda cek dulu.

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Ya, diralat Pak Ketua, Banten tidak ada, yang ada Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

KETUA RAPAT:

Saya bingung.

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Sebentar, Pak Ketua. Ini saya kan perlu dicek dulu, Pak Ketua, mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Jadi, kalau setiap saya bertanya Eselon I, tanya Eselon II. Eselon II-nya *nggak* tahu, tanya Eselon III atau Eselon IV yang ada di atas, kalau ada di atas, atau WA dulu untuk bertanya benar *nggak* informasinya.

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Izin, Pak Ketua. Ini ada di catatan saya, Jawa Barat: Subang, Cianjur, Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor. Jawa Timur: Pacitan, Malang, Pasuruan, Tulungagung. Sulawesi Selatan: Bantaeng, Maros, Bone, Bulukumba, Gowa. Kalimantan Selatan: Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bumbu.

KETUA RAPAT:

Tadi Snda katakan 4 kabupaten, sekarang kok kabupatennya bertambah.

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

4 provinsi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

4 provinsi. Sebutkan lagi coba.

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.

KETUA RAPAT:

Kabupatennya?

DIRJEN BPSDMP (Prof. Ir. DEDI NURSYAMSI, M.Agr.):

Jawa Barat: Subang, Cianjur, Tasikmalaya, Sukabumi, Bogor. Jawa Timur: Pacitan, Malang, Pasuruan, Tulungagung. Sulawesi Selatan: Bantaeng, Maros, Bone, Bulukumba, Gowa. Kalimantan Selatan: Banjar, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu.

KETUA RAPAT:

Ya. Saya kadang-kadang bingung aja, catatan Anda sama catatan saya beda. Yang Anda bilang tadi pertama itu sebetulnya lebih benar, tapi karena Anda bingung menjelaskan kepada saya, langsung berubah lagi. Ini cuman 5 kabupaten *kok*, ya. Saya kadang-kadang bingung, gimana saya mau ngomongnya kalau ditanya aja *nggak* jujur, *nggak* tahu.

Kemudian PKH, saya tanya lagi. Ini ada keluhan daripada peternak rakyat peternak-peternak kecil, mengenai harga jagung. Dengan kadar air 15 di Lampung harganya 6.500, di Jawa Timur 6.650, di Sulawesi Selatan di Gorontalo 5.800, nunggu bangkrut atau nunggu apa *nih*? Coba, saya mau tahu jawab. Apa tunggu peternakannya mati dulu peternak rakyat kecil atau gimana? gimana solusinya. Karena ini menyangkut peternak kecil, saya tidak bicara pengusaha. Silakan, jawab.

DIRJEN PKH KEMANTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Izin, Pak Ketua, Pak Wamen.

Di awal tahun prediksi kami berdasarkan prognosa dari produksi jagung kita mencukupi, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Awal tahun, tahun 3000 apa tahun 2022?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

2023 kan kita menghitung (*suara tidak jelas*) pangan, hitung produksi.

KETUA RAPAT:

Berapa produksinya 2023?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

23 juta, untuk kadar air.

KETUA RAPAT:

Kebutuhannya?

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Kebutuhan, khusus untuk peternakan, Pak Ketua. Untuk industri kurang lebih 10 sampai 12 juta.

KETUA RAPAT:

Kita anggap 12 juta.

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Iya.

KETUA RAPAT:

Ya.

DIRJEN PKH KEMENTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Kemudian peternak mandiri sekitar 2 sampai 3 juta, rata-rata 2 juta.

KETUA RAPAT:

Kita anggap 3 juta. Terus?

DIRJEN PKH KEMANTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Nah, kalau kita melihat prognosa produksi jagung harusnya cukup, Pak. *Nah*, sehingga persoalan harga. *Nah*, sehingga Pak Ketua memang dari tahun ke tahun kan sering terjadi di akhir tahun persoalan ini. Kalau dari dulu kami menyarankan kalau bisa untuk melindungi peternak rakyat, kita perlu ada cadangan jagung nasional seperti halnya beras, paling tidak 500.000 ton, sehingga hal-hal seperti ini bisa kita tertangani dengan baik.

Nah, saat ini Bapanas sudah membantu juga, tapi hanya membantu untuk memfasilitasi distribusi atau transportasi kepada peternak rakyat dari sumber jagung yang ada.

Demikian, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau saya hitung, surplusnya 8 juta. Seolah-olah ini adalah tanggung jawab Bulog dan Bapanas untuk stok *buffer* jagung, iya kan. Yang saya tanyakan, solusinya bagaimana? apa ayamnya *nggak* dikasih makan atau peternaknya jangan beternak lagi beternak kecil atau gimana? *Nggak*, ini kan harus ada solusi *loh* karena mereka tuh mau demo, demo Kementerian Pertanian. Saya bilang, Menteri mah *nggak* salah, yang salah yang bantunya dalam membuat laporan dan lain-lain. Silakan dijawab. Karena, besok saya ke Lampung, saya akan bertemu dengan mereka nuntut ketemu saya, saya akan temuin.

Jadi, nanti kalau saya sampai *nggak* bisa jawab, dia bilang saya Anggota Dewan yang tolol *nggak* bisa menjawab pertanyaan rakyat. Bingung saya. Tolong bantu cari solusinya gimana.

DIRJEN PKH KEMANTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Izin, Pak Ketua, Pak Wamen.

Jadi selain daripada yang dilakukan oleh Bapanas sekarang, jadi ada membantu peternak rakyat untuk ongkos distribusi jagung sehingga bisa menekan harga yang ada. Karena prinsipnya jagungnya ada gitu, cuma harganya yang mahal.

Yang kedua, untuk menghindari dominasi karena *feedmill* atau pabrik pakan ya punya sumber daya yang kuat sehingga dia bisa kemana-mana untuk menyerap. *Nah*, untuk mengurangi itu salah satu yang kita bisa lakukan adalah mereka mensubstitusi mungkin dengan gandum atau, atau, atau apa namanya sereal lainnya sebagai substitusi daripada jagung sehingga tidak terlalu mendominasi untuk membeli semua jagung-jagung yang ada di mana saja yang mengakibatkan harga jagu naik dan kemampuan peternak rakyat tidak mampu.

KETUA RAPAT:

Kalau jagungnya ada di Lampung, orang *nggak* bakal kebingungan, Bos. Justru jagungnya yang *nggak* ada. Percuma ada Badan Pangan mau bantu distribusi ongkos kalau hanya sekitar Lampung, kecuali misal jagungnya di Gorontalo ada 2 juta perlu angkutan bawa ke Pulau Jawa atau bawa ke Sumatera, *fair*. Itu kan hanya sesaat sebetulnya, ngobatinnya gimana saya tanya? tadi udah saya jelaskan *day to day*, saya selalu dapat komplain masalah beras, masalah jagung, masalah lain-lain.

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Terima kasih.
Izin, Bapak Pimpinan dan ini sama dengan...

KETUA RAPAT:

Saya maunya Wandi jawab dengan realita, jangan dengan angin surga. Saya tidak butuh angin surga yang lalu-lalu. Coba jawab.

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Terima kasih, Pak.

Salah satu solusinya adalah kemitraan antara petani jagung di sekitar peternak mandiri, Bapak. Di kalau di daerah Blitar nanti di sekitar Blitar sampai ke Lamongan, Tuban bermitra dari petani di situ ke Blitar. Kemudian juga daerah Kendal, Bapak, dan nanti Lampung. Tahun ini sudah kemitraan 2000 hektar, Bapak, dan nanti kita tambah terus. Terima kasih. Itu salah satu.

Yang kedua, Bapak, peternak supaya membikin pakan sendiri dari bahan yang dibeli dari petani tadi.

KETUA RAPAT:

Dari Biosaka bukan, pakannya, bukan?

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Beli pakan, *anu* membikin pakan ayamnya dari membikin sendiri. Jadi usaha kecil mengolah dari jagung *plus* konsentrat lainnya dicampur menjadi pakan ternak sehingga lebih efisien daripada beli, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, kayaknya anda lebih cocok jadi Dirjen PKH nih daripada Dirjen Tanaman Pangan.

DIRJEN TP KEMANTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau saya bilang, begitu.

Jadi kemitraan yang diomong itu omong kosong Wandu, saya kasih tahu. Itu kan bukan solusi. Masalahnya, solusi dalam waktu dekat ini bagaimana? kalau bicara tadi impor gandum *you nggak* usah ajarin saya, iya kan. Harga gandum pun saat ini dari luar negeri sudah naik.

Saya tuh setiap hari saya ngamatin nih, harga beras dunia berapa, harga jagung dunia berapa, hari ini harga jagung dunia kurang lebih lima ratus empat tiga puluh, harga beras sudah mencapai 680 US Dollar. Ini para Dirjen, saya rasa belum tentu mengamati ini, yakin lah sama saya. Juga Dirjen PKH berkali-kali sudah saya bilang, saya katakan jangan ada *cutting* kalau ada *cutting* kan kasihan, dengan jalan apa? ya kurangi import GPS-nya. Ini GPS-nya banyak, *over supply*, ya mau *nggak* mau harus di *cutting*, iya kan.

Saya juga bingung kalau bilang surplus 8 juta, tapi jagungnya *nggak* ada hitungannya dari mana. Cobalah kalau bicara yang realistis.

Badan Pangan, tadi Anda mendengar kedua Dirjen ini, Eselon I ini mengatakan seperti itu. Apa tanggapan Anda perihal ini, ini kan menyangkut Badan Pangan.

KEPALA BAPANAS (ARIEF PRASETYO ADI, S.T., M.T.):

Terima kasih, Ketua.

Ini salah satu PR Badan Pangan Nasional bersama Bulog mempersiapkan cadangan pangan dan pakan, Ketua, termasuk jagung sehingga kalau dalam tren di akhir tahun seperti ini kita ada keterbatasan baik produksi jagung maupun produksi beras, itu kita punya cadangan. Hari ini jagung belum punya, kedelai belum punya, Ketua. Ini nanti koreksi buat kami dan Bulog.

Mengenai *buffer stock* ini yang belum ada, Ketua. Saya tidak pro *import*, tetapi kalau memang diperlukan kita perbaiki neraca komoditas karena neraca komoditas itu adalah nanti dengan Kemenkoperekonomian kita sama-sama dan ini harus terbatas. Kami juga perlu kerja sama dari peternak, karena saya dengan Dirjen PKH biasanya minta *forecast* dari peternak. Kadang-kadang sudah disiapkan juga dengan Bulog nanti *nggak* dibeli juga, Ketua, sehingga ini perlu saling.

Demikian Ketua sebagai *update*.

KETUA RAPAT:

Saya minta contoh, baik PKH maupun TP. Di Lampung itu kebutuhan, saya tanya, kebutuhan peternak kecil dan kebutuhan pabrik *feedmill* itu berapa sih kira-kira kebutuhannya? Iya.

DIRJEN PKH KEMANTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Saya *nggak* punya data per provinsi.

KETUA RAPAT:

Wah, luar biasa. Ini dia yang saya.

DIRJEN PKH KEMANTAN (Dr. Ir. NASRULLAH):

Total ada, Pak, tapi boleh kami hitung, Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau Wandu, Lampung berapa produksi jagung? tadi kan Anda katakan tetap anggaran turun tetap segitu, 23 juta ton. Coba Lampung berapa saya mau tahu produksinya?

DIRJEN TP KEMANTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Iya, baik, Bapak.

Panen nasional bulan Agustus, September ini per bulan.

KETUA RAPAT:

Saya bicara 1 tahun.

DIRJEN TP KEMANTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Untuk. Oh, 1 tahun.

KETUA RAPAT:

Khusus Lampung.

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Ya, Lampung. Untuk Lampung luas panen dulu, Pak, luas panen total Lampung itu 400... setahun, Bapak, 414.000 hektar produk.

KETUA RAPAT:

414.000.

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

14000 hektar.

KETUA RAPAT:

Hektar? 14.

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Empat satu empat ribu hektar.

KETUA RAPAT:

414.000 hektar.

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Iya, betul.

KETUA RAPAT:

Lampung?

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Jumlah yang ditanam seluruh Indonesia berapa juta?

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

4,5 juta hektar.

KETUA RAPAT:

Kalau dari 414 kira-kira menghasilkan berapa juta?

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Ya, sekitar 10% kalikan 5,6, Bapak.

Iya ya sebentar, Pak. 5,6 kali 4, sekitar 2,3 juta ton.

KETUA RAPAT:

Berapa?

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

5 eh 2,3 juta ton.

KETUA RAPAT:

2,3 juta ton.

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Pipil basah 27%.

KETUA RAPAT:

Pipil basah?

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Iya.

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Sekitar 2,3.

KETUA RAPAT:

Anda yakin dengan, dengan apa data yang Anda kirimkan ini? 14, *empat satu empat ribu* hektar. Dan hasil yang di itu kan 5,6 ton per hektar. Jangan

bingung Wandu, santai aja, kan saya juga santai nanyanya, *nggak* marah. Yakin *nggak*?

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Yakin, Pak.

KETUA RAPAT:

Yakin?

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Yakin. Bisa.

KETUA RAPAT:

Bibitnya HU berapa itu?

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Bibitnya.

KETUA RAPAT:

Jujur.

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Ada variasi, Bapak.

KETUA RAPAT:

Ada yang 1, ada 2, ada yang 3, ada yang 4?

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Iya. *Nggak, nggak* sampai 4 Pak. Kan U1, U2, U3 aja.

KETUA RAPAT:

Ingat *nggak* rapat kerja Anda, saya sudah perintahkan tidak ada HU2, HU3. Berarti ini ada permainan pengadaan bibit jagungnya. Waktu itu sudah berapa setahun, 2 tahun saya *nggak* pertanyakan. Sekarang saya pertanyakan lagi, tiba-tiba keluar lagi HU2, HU3.

Ayu masukkan kesimpulan rapat, kalau terjadi lagi kita laporkan aja ke aparat penegak hukum. Masukkan Ayu.

Inget kan Raker dulu, tidak ada HU2, HU3 kan?

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Betul, Bapak.

KETUA RAPAT:

Ya, kenapa tiba-tiba sekarang ada lagi?

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Tadi Bapak nanya yang beredar sekarang sekelas.

KETUA RAPAT:

Bukan, yang saya tanya tadi Anda. Yang saya tanyakan itu pengadaan bibit yang Anda lakukan itu sudah HU1, 2, 3, 4. Saya tahu cuma HU1, 2, 3, *nggak* ada 4 kok. Anda jawab 1, 2, 3 tadi pengadaannya. Iya.

DIRJEN TP KEMENTAN (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Izin, Bapak.

Pengadaan tahun ini dan tahun lalu itu pakai *e-katalog* harga maksimal atau harga rata-rata 42.000 per kilo. *Nah*, sementara jenisnya adalah benih-benih dari multinasional dan benih-benih jagung dari produksi nasional, ada dua itu, Pak. Memang kami di dokumen semuanya juga *nggak* pakai U2, U3, tetapi istilah lama Bapak nanya itu begitu.

KETUA RAPAT:

Sudahlah, Wandi perlu saya bongkar semua di sini supaya se-Indonesia tahu, perlu? perlu *nggak*? Anda saya kasih kesempatan jujur, bukan menjawab jujur. Kasihan, saya ini kasihan lihat petani mereka *tuh* berharap dengan harga jagung yang bagus, baik di atas 6.000, penghasilan mereka meningkat, mereka akan berterima kasih kepada Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian, dikasih bibit yang bagus, peningkatan produksi yang bagus, harga jual yang bagus. Tapi Anda, saya tanya aja jawabnya *nggak* jujur. Saya mesti ngomong apa lagi, ini nanti saya tanyakan lagi *nih* sewaktu-waktu *nih* ya. Iya, saya ingatkan.

Silakan, Bu Ketua. Lanjutkan. Saya udah cukup nanya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik.

Terima kasih.

Masih ada dari Bapak-Ibu Anggota? Cukup. Kita masuk ke kesimpulan kalau sudah tidak ada lagi. Pak Budi, *will you*.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Silakan tampilkan aja, kesimpulannya.

Kesimpulan keputusan:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA tahun 2024 sebesar Rp14.658.088.222.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal: Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga serta menyetujui usulan realokasi eksternal lingkup Eselon I Kementerian Pertanian untuk pemenuhan kebutuhan operasional penyuluh dalam penyediaan paket pulsa selama 1 tahun, tahun anggaran 2024 sebesar Rp34.486.200.000,00 sehingga komposisi per Eselon I menjadi sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar...

KETUA RAPAT:

Pimpinan boleh *nggak* operasional penyuluh dalam penyediaan paket pulsa selama satu tahun untuk pelaporan kegiatan produksi dan lain-lain kepada Kementerian Pertanian, supaya jelas kita ngasih pulsa itu untuk apa? kan untuk beli paket pulsa. Pulsanya untuk apa? untuk membuat pelaporan. Pelaporannya ke mana? ya ke Kementerian Pertanian, supaya jelas. Jangan nanti dipakainya untuk main *Facebook*, *Twitter*, dan lain-lain. Iya, mesti jelas untuk apa. Coba kata-katanya disusun dulu yang baik.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Saya ulang ya.

Kesimpulan keputusan:

1. Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam rencana kerja anggaran tahun 2024 sebesar Rp14.658.088.222.000,00 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/

PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal: Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, serta menyetujui usulan realokasi eksternal lingkup Eselon I Kementerian Pertanian dalam penyediaan paket pulsa selama 1 tahun untuk pelaporan kegiatan produksi dan lain-lain kepada Kementerian Pertanian pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp34.486.200.000,00 sehingga komposisi per Eselon I menjadi sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.888.459.124.000,00;
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp124.237.528.000,00;
- c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp2.996.398.166.000,00
- d. Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp1.006.217.436.000,00;
- e. Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp1.063.920.733.000,00;
- f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.538.766.758.000,00;
- g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp2.575.954.350.000,00;
- h. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian sebesar Rp958.016.150.000,00;
- i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp939.734.267.000,00;
- j. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp966.383.630.000,00.

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan rencana kerja anggaran Kementerian Pertanian tahun 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

KETUA RAPAT:

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

WAMEN PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Setuju, Ketua.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai pagu anggaran dana alokasi khusus Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024 sebesar Rp2.762.645.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DAK Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp2.462.600.000.000,00;
 - b. DAK non Fisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp300.045.000.000,00.

KETUA RAPAT:

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

WAMEN PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Setuju, Ketua.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan anggaran dan kegiatan pembangunan pertanian di kawasan perbatasan minimal Rp10.000.000.000,00 di setiap lokasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw, serta Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.

KETUA RAPAT:

Boleh *nggak* ditambahin Provinsi NTB eh NTT, Kalbar dan Papua. Bukan gitu Pak Sulaeman, betul kan? ini kan.

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Pimpinan. Iya, betul.

KETUA RAPAT:

NTB eh NTT, Kalbar, dan.

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Papua.

KETUA RAPAT:

Papua. Ini yang punya Dapilnya karena sudah masuk kesimpulan pada pergi semua ini.

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Pak Ketua, izin.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Saya tadi sampaikan kalau bisa itu dipindah ke Selatan. Boleh *nggak* di Merauke itu?

KETUA RAPAT:

Tapi nanti kalau itu kan *nggak* sesuai dengan Inpres.

F-PG (ALIEN MUS)

Iya, Ketua. Izin, Ketua.

Inpresnya itu Aruk, Motaain, dan Skouw.

KETUA RAPAT:

Nggak bisa, Pak, karena ini kan kita bicara Inpres ya harus sesuai dengan Inpres karena Dapil Bapak pindah ya Pak ya?

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Bukan. Di Skouw itu kan sudah banyak pembangunan, sedangkan di selatan masih sangat sedikit.

KETUA RAPAT:

Tapi gini, Pak.

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Sama-sama perbatasan.

KETUA RAPAT:

Gini, gini, nanti kan bicara dari hati ke hati aja lah. Ya udah, di selatan nanti ditambah 5 miliar, di Skouw tetap 10, kan bisa Pak, iya karena kita *nggak*, kita takut, ini Instruksi Presiden. Ya, nanti Sekjen, Pak Menteri minta tolong kalau memang ada anggaran yang disisir bisa dapat-dapat 5 miliar, ditempatkan di selatan sesuai dengan Pak, usulan tadi Pak Sulaeman ya. Ya, Pak Sulaeman ya?

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Perlu, perlu dimasukkan ke provinsinya *nggak* itu?

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Iya, kalau bisa dimasukkan.

KETUA RAPAT:

Masukkan, NTT, Kalbar, dan Papua, Papua Tengah apa Skouwnya apa masuknya?

F-P.NASDEM (H. SULAEMAN L HAMZAH):

Skouw, Papua induk, Pak.

KETUA RAPAT:

Papua induk, iya. Di atasnya *dong*. Aruk *tuh* mana, Motaain *tuh* mana, Skouw *tuh* mana. Mana yang punya Dapilnya?

Papua induk, ya? sebutnya Papua induk ya?

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Papua saja.

KETUA RAPAT:

Papua saja.

Nomor 3, setuju, Anggota? Pak Edward setuju *nggak*, jawab *dong* pakai *mic dong*. Kalau *nggak*, *nggak* nomor 4 nanti.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Setuju, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh, setuju.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi dan realokasi anggaran dukungan manajemen di setiap Eselon I Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024 menjadi program-program yang lebih berdampak langsung pada petani dan peternak dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ini yang mana *sih*? Yang itu Pak, Pak Budhy yang itu aja yang dibaca.

KETUA RAPAT:

Jangan ini, Bapak baca depan aja Pak. Ulang lagi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun rencana kerja dan program harus fokus kepada program nasional, program unggulan, serta fokus kepada program-program yang berdampak konkret kepada petani dan peternak, antara lain program yang berkaitan dengan pencegahan penyakit hewan serta peningkatan produksi dan produktivitas pertanian mengacu kepada catatan, masukan, serta saran yang disampaikan pada rapat kerja hari ini dan rapat-rapat sebelumnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan realokasi anggaran dukungan manajemen di setiap Eselon I Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024 menjadi program-program yang lebih berdampak langsung pada petani dan peternak dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas.

KETUA RAPAT:

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

WAMEN PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Setuju, Ketua.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023. Selanjutnya, untuk program dan kegiatan yang realisasinya masih di bawah 50% agar direalokasi kepada program yang mendukung peningkatan produksi pertanian berdasarkan catatan, masukan.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf, Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Iya.

KETUA RAPAT:

Saya rasa kemarin ini kan sudah. Sudah, jadi *nggak* perlu dimasukkan, di *drop* aja. Sudah. Jangan ulang-ulang, nanti bingung. Ya. Nomor 5.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar melaksanakan keputusan rapat dan apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan agar disampaikan serta mendapat persetujuan dari Komisi IV DPR RI melalui mekanisme rapat kerja.

KETUA RAPAT:

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

WAMEN PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Siap. Setuju, Ketua.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam penyaluran bantuan jagung menggunakan bibit jagung yang unggul dan berkualitas (HU1).

KETUA RAPAT:

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

WAMEN PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Setuju Ketua.

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Izin Pak Ketua. Boleh Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Pak Wamen main setuju aja, bukan tanya sebelahnya. Memang ngerti apa.

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Izin, Ketua.

Ada tambahan yang diperlukan untuk disimpulkan, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Apa itu?

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Rincian anggaran per program. Kalau tadi kan per Eselon I itu, ini harus di di bahas di TA maka harus di *state* Pak per program. Jadi, ada empat program kan kita. Jadi, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, kemudian program nilai tambah saing, Pak. Mohon dimasukkan.

KETUA RAPAT:

Tolong dimasukkan usulan dari Sekjen. Bacakan Sekjen. Langsung diketik masukan.

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Baik.

7. Komisi IV DPR RI menyetujui rincian anggaran Kementerian Pertanian per program sebagai berikut:
 - 1) Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas Rp8.226.124.614.000,00;
 - 2) Program nilai tambah dan daya saing industri satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus Sembilan...

KETUA RAPAT:

Pak Kasdi, kalau saya rasa ini *nggak* perlu. Nanti di Dipa-nya kan Anda cantumkan aja, Dipa-nya kan harus saya tanda tangan. Ini kan tidak perlu ke DJA, yang ke DJA kan Dipa. Ini kan untuk laporan ke Badan Anggaran.

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Bukan. Izin, Pak Ketua.

Jadi yang dibahas di sana nanti per program Bapak, izin.

KETUA RAPAT:

Iya, saya tahu. Tapi kan di Dipa sudah ada nanti.

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Iya, di Dipa ada.

KETUA RAPAT:

Iya kan?

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Iya.

KETUA RAPAT:

Yang ke DJA kan Dipa, bukan ini. Ini kan untuk ke Badan Anggaran. Selama ini kan *nggak* pernah ada.

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Oh, siap.

KETUA RAPAT:

Ya. Yang 7 dihapus. Nanti kan Dipannya kan saya lihat, sesuai *nggak*, ya. Jadi, karena...

F-PG (ALIEN MUS):

Ketua. Bisa tambah satu.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (ALIEN MUS):

Kemarin kan kita menyampaikan ke Kementerian Pertanian bahwa meminta rincian untuk ke penyerapan di bawah 50% dan kita tahu persis ada realokasi anggaran di tahun 2023, ini harus masuk kesimpulan, Ketua. Kalau *nggak*, saya yakin dan percaya *nggak* mungkin diberikan realokasi antara per Eselon I misalkan pergeseran di Eselon I di tahun 2023. Jadi ini kita harus masukin kesimpulan, Ketua.

KETUA RAPAT:

Rasanya kemarin di RDP sudah ada itu, kata-kata itu. Kan tadi kan sudah dibahas antara Pimpinan berdua dan Mbak Alien. Jadi maksudnya sama Kasdi *nggak* percaya gitu?

F-PG (ALIEN MUS):

Ini sistem penganggaran, Ketua.

KETUA RAPAT:

Tadi sudah saya tulis. Kemudian minta didrop. Sekarang minta ditulis lagi. Gimana?

Pendapat Pak Kasdi gimana, dia *nggak* percaya sama Pak Kasdi.

SEKJEN PERTANIAN (KASDI SUBAGYONO):

Iya. Saya kira perlu, perlu dicantumkan.

KETUA RAPAT:

Dicantumkan aja masukannya.

Bacakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023. Selanjutnya, untuk program dan kegiatan yang realisasinya masih dibawah 50% agar direalokasi kepada program yang mendukung peningkatan produksi pertanian berdasarkan catatan, masukan, serta saran yang disampaikan pada rapat kerja hari ini dan rapat-rapat sebelumnya antara lain untuk alat dan mesin pertanian dari (prapanen dan pascapanen).

KETUA RAPAT:

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

WAMEN PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Izin, Ketua.

Nomor poin 6. Kalau yang ini setuju, Ketua. Yang nomor 6 ini bibit jagung yang unggul dan berkualitas (HU1) minta izin diganti yang berkualitas terbaik.

KETUA RAPAT:

Saya *nggak* mau. Tadi udah jelas, unggul dan berkualitas baik (HU1). Berkualitasnya ditambahin berkualitas baik. Terbaik. Ya.

KETUA RAPAT:

Pemerintah, setuju?

WAMEN PERTANIAN (HARVICK HASNUL QOLBI, S.T.):

Setuju, Ketua.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Sekarang ini kendala di lapangan adalah air. Jadi hampir semua wilayah itu minta sumur bor dalam, akan tetapi kalau saya melihat, mengevaluasi di khususnya di Lampung itu hampir sebagian besar mangkrak atau tidak berjalan itu biasanya dari pemerintah daerah sedikit dan sedikit lagi dari Kementerian PU. Karena begitu pompanya ini kan masuk ke dalam tanah, kabelnya tidak pas sedikit, konslet dinamanya hangus. Kalau pada saat itu diangkat, diperbaiki.

Kadang-kadang berpikir, bukan tanggung jawab saya *nih* untuk memperbaiki ini. Ya, mangkrak lah. Itu kan harganya cukup mahal, satu pengeborannya itu kalau dengan kedalaman kurang lebih 100 meter ya di atas 100 juta. Kalau yang minta satu, kalau yang minta 500 kan cukup besar dan ini hampir semua wilayah di Lampung itu gagal karena begitu *nggak* ada airnya distop 3 bulan, 4 bulan *nggak* jalan ya rusak pompanya.

Coba Pak Ali Jamil ada pandangan untuk itu *nggak* masalah pompa air tadi? kan Pak Ali Jamil kan berapa kali ke Lampung sama saya, suka mendengar itu.

DIRJEN PSP KEMANTAN (ALI JAMIL, MP, Ph.D.):

Izin Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Ketua,
izin Pak, Bapak-Ibu semua.

Ini sebenarnya kalau kewenangan sumur dalam, Pak, itu di PUPR, Pak, kewenangan kalau subur dalam Pak, kecuali sumur pantek tadi yang barangkali 20-50 meter itu masih bisa di kita, Pak. Tapi kalau dalam, bahkan ada yang 500 meter mintanya itu, itu sudah di PUPR karena akan menyangkut dengan air bawah tanah, Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

DIRJEN PSP KEMANTAN (ALI JAMIL, MP, Ph.D.):

Iya, altap itu, Pak, altap.

Izin.

Kalau misalnya masih ada sumber air dari sungai ya Pak misalnya, mungkin bisa kita cek dengan ada yang program di kita ini program pipa, Pak, atau pompa kalau memang ada sumber yang dari sungai.

Itu Pak Ketua, tambahan aja.

KETUA RAPAT:

Karena, *gini loh*. Contohnya bendungan yang diresmikan pemerintah di Kabupaten Pringsewu beberapa waktu lalu ya sungainya di mana, sawahnya di mana. Kalau saya tadi dikatakan kalau memang ada aliran dari sungai, kalau, kalau cuman 50 meter, kalau 300 meter berapa pompa berapa pempipaannya untuk menyedot dari bawah sampai ke atas. Kan kendalanya di situ, ya.

Dari Badan Pangan, ada tambahan? Bulog? PIHC?

DIRUT PIHC (RAHMAD PRIBADI):

Izin, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan Komisi IV beserta seluruh Anggotanya,
Pak Menteri dan Wakil Menteri beserta seluruh jajarannya,
Kepala Bapanas dan rekan-rekan Dirut, Dirut BUMN yang hadir,

Izinkan kami menyampaikan satu pernyataan terima kasih atas dukungan dari seluruh Komisi IV dan Kementerian Pertanian. Satu hari setelah rapat tanggal 30 Agustus, kami sudah mendapatkan surat dari Kementerian Pertanian terkait dengan pembayaran apa kurang tagih subsidi dan sekarang sedang berproses di Irjen Kementan dan, dan BPK. Mudah-mudahan sinergisitas dan nuansa kebatinan yang positif ini bisa terus berlanjut, sehingga kami bisa terus menjalankan tugas menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasihnya jangan sama Komisi IV, sama Pak Dirjen PSP, Pak Sekjen, sama Menteri Pertanian, karena yang tanda tangan dia, bukan saya gitu, ya.

Kalau tidak ada lagi, hubungi Menteri Pertaniannya sudah datang rapatnya nanti segera kita tutup.

Sebelum kami menutup rapat kerja hari ini, persilakan Pak Menteri atau Pak Wakil Menteri untuk menyampaikan kata penutup.

MENTERI PERTANIAN (Dr. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat sore,
Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV yang kami muliakan, yang kami hormati,
Pak Wamen, segenap Pimpinan BUMN yang saya tidak sebut satu persatu,
Para Dirjen, Sekjen, dan Kepala Badan,
Bapak Ibu sekalian,

Hamdan wa syukron lillah, wala haula wala quwwata illa billah. Minta maaf karena harus mendampingi KTT di KTT, Pak Ketua. Saya lapor, ada tiga isu besar masalah keamanan lintas negara, masalah pangan, dan terakhir adalah masalah energi *green energy* sehingga Kementan harus mendampingi.

Saya minta maaf. Berkali-kali negosiasi untuk saya tentu mengutamakan pertemuan kita hari ini, tapi Presiden minta memang karena pangan harus didampingi oleh Kementan. Izin.

Pertemuan kita dan apa yang dicapai Pak Wamen, saya sampaikan terima kasih, sudah berlangsung, Bapak. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV, kami taat patuh pada asas-asas dan kesepakatan. Terima kasih kerja sama BUMN, terutama Bulog, Pak Arief dan semuanya yang pasti saja menghadapi pangan besok *nggak* baik-baik saja, Bapak. Semua negara menyampaikan kekhawatirannya bahwa besok pangan akan menjadi sebuah masalah yang kritis *point* dan itu oleh semua negara. Oleh karena itu, termasuk Indonesia Bapak. Dan kita berharap memang langkah ini hanya ada bisa baik kalau kesepakatan-kesepakatan kita saling mendukung dan mohon pengawalan yang asistensi dari Komisi IV.

Kami siap menjalani semua keputusan yang ada Pak Sekjen, Pak Dirjen. Dan selama ini *Insyaa Allah* sepanjang kami dikasih tahu. Selamat datang juga Pak Budhy, semoga apa yang Ketua arahkan selama ini mudah-mudahan kita bisa capai, memang tidak, tidak semudah yang kita harapkan karena ternyata dalam waktu satu, dua minggu saja kekeringan di danau-danau dan di *anu eh* kelihatan serapannya sampai turun sampai 30-40% Pak. Jadi, memang masalah kita adalah kekeringan.

Mohon selalu petunjuk Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV, kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas ini lebih baik ke depan *Insyaa Allah*. Terima kasih atas kerja sama dan berbagai kebijakan yang ditempuh di Komisi IV ini. Ridho Allah bersama kita. Sekian. Pak Wamen, terima kasih.

Sekian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi yang tadi sebutkan Budi yang mana *nih* karena Budi ini dua-duanya satu koalisi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (BUDHY SETIAWAN):

Masih cair Ketua, masih cair.

KETUA RAPAT:

Kan udah tanda tangan, seperti PKB dengan Pak SYL.

Terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV, mohon maaf apabila kami memimpin rapat ada kekurangan, kekhilafan.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbil'alamin*, rapat kerja sore ini kita tutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB)
(KETUK PALU 3 KALI)**

a. n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

ULFA NURFAJAR, S.E., M.A.B.
NIP. 197401251993022001